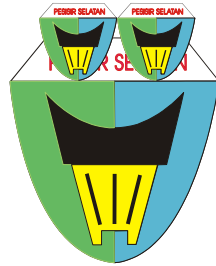


PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) TAHUN 2020 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH(SPIP)

**KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DAFTAR ISI

I.	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	2
	C. Maksud dan Tujuan	2
	D. Ruang Lingkup	3
II.	Sekilas Tentang SPIP	3
	A. Pengertian SPIP	3
	B. Tujuan SPIP	4
	C. Unsur-unsur SPIP	4
	1. Lingkungan Pengendalian	4
	2. Penilaian Resiko	5
	3. Aktivitas Pengendalian	5
	4. Informasi dan Komunikasi	6
	5. Pemantauan Berkelanjutan	7
	D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>)	7
III.	Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan	8
	A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalianj Yang baik	8
	B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini	8
	C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	10
IV.	Risiko dan Kegiatan Pengendalian	11
	A. Pernyataan Tujuan	11
	B. Risiko-risiko	12
	C. Pengendalian Terpasang	13
	D. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan	14
V.	Informasi dan Komunikasi	15
VI.	Pemantauan dan Evaluasi	15
VII.	Penutup	16
	Lampiran	

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan Good Governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah.

Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 merupakan pondasi Penyelenggaraan SPIP di pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyelenggarakan SPIP.

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan

SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/58/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2020.

II. SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang

ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut

standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan

dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidir lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini

disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif;
dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan; Seluruh lingkup

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh aparatur pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2:Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
		Pentingnya integritas dan nilai-nilai etika dikomunikasikan oleh Camat dan ditekankan berulang kali kepada semua aparatur Kecamatan BAB Tapan dan diharapkan adanya perubahan positif atas penegakan integritas dan nilai etika dari aparatur kecamatan basa ampek balai tapan.
		adanya reward dan punishment bagi aparatur kecamatan basa ampek balai tapan atas penegakkan integritas dan nilai etika di lingkup kantor kecamatan basa ampek balai tapan

IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2020, rencana tindak pengendalian yang disusun Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai

Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Meningkatkan Nilai LAKIP
3. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

Risiko atas pencapaian tujuan 1:

- Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayan yang diberikan kepada masyarakat.
- Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2019 77,29 % (Baik).

Risiko Pencapaian Tujuan 2:

- Nilai LAKIP kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2019 (B)

Risiko Pencapaian Tujuan 3:

- Fasilitasi, monitoring dan pembinaan kegiatan administrasi pemerintahan Nagari dan pengelolaan keuangan Nagari.

Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
 - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengurangi durasi waktu pelayanan
- b. Kegiatan Peningkatan Nilai LAKIP
 - Meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi data pendukung terhadap laporan yang berkaitan dengan Nilai LAKIP Kecamatan .
- c. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Nagari
 - Selalu melakukan fasilitasi, pembinaan dan monitoring terhadap administrasi pemerintahan Nagari dan pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari.

D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Tujuan 1: adanya evaluasi dari Pemerintah kabupaten atas pelayanan masyarakat yang ada di kecamatan BAB Tapan

Tujuan 2 : pembinaan dan pemeriksaan langsung oleh inspektorat kabupaten terhadap laporan Kinerja yang disampaikan.

Tujuan 3 : pembinaan dan pemeriksaan langsung oleh inspektorat kabupaten ke pemerintahan nagari

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian

yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

- a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
 - Peningkatan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat.
- b. Kegiatan Peningkatan Nilai LAKIP Kecamatan
 - pembinaan dan pemeriksaan langsung oleh inspektorat terhadap Laporan Kinerja yang disampaikan.
- c. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Nagari
 - pembinaan dan pemeriksaan langsung oleh inspektorat terhadap pemerintahan Nagari.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan.

Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Camat atau Sekretaris Camat pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuan pada lampiran 5

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan selaku auditor Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

VII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Mengetahui,



LAMPIRAN I**RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target waktu Penyelesaian
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparaturnya Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	Camat BAB Tapan	Minimal 2 Bulan
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.		
		Pentingnya integritas dan nilai-nilai etika dikomunikasikan oleh Camat dan ditekankan berulang kali kepada semua aparaturnya Kecamatan BAB Tapan dan diharapkan adanya perubahan positif atas penegakan integritas dan nilai etika dari aparaturnya kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.		
		Adanya reward dan punishment bagi aparaturnya kecamatan Basa Ampek Balai Tapan atas penegakan integritas dan nilai etika di lingkup kantor kecamatan Basa Ampek Balai Tapan		

REKAPITULASI JAWABAN KUESIONER

RESPONDEN / PERTANYAAN	REKAPITULASI JAWABAN										REKAPITULASI JAWABAN				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	Total
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	10	10
3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	10	0	0	10
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	10	0	0	10
7	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	0	3	7	0	10
8	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	0	7	3	0	10
9	2	2	4	2	2	3	2	2	3	3	0	6	3	1	10
10	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	0	4	6	0	10
11	2	2	4	4	2	4	4	2	4	4	0	4	0	6	10
12	2	2	4	4	2	4	4	2	4	4	0	4	0	6	10
13	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	0	4	6	0	10
14	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	0	3	7	0	10
15	3	2	4	4	3	4	4	2	3	4	0	2	3	5	10
16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	10	0	0	10
17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	10	0	0	10
18	2	3	4	4	3	4	4	2	4	4	0	2	2	6	10
19	2	2	4	4	2	4	4	2	4	4	0	4	0	6	10
20	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	0	3	7	0	10
21	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	0	3	7	0	10
22	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	0	0	3	7	10
23	2	2	4	4	2	4	4	2	4	4	0	4	0	6	10
24	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	0	4	6	0	10
25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	10	0	0	10
26	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	0	0	5	5	10
27	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	0	4	6	0	10
28	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	0	3	7	0	10
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
30	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	0	2	8	0	10
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
35	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	0	4	6	0	10
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
37	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	0	2	8	0	10
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
41	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	0	4	6	0	10
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10

43	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3	0	4	6	0	10
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
49	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	0	4	6	0	10
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	10	0	0	10
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
54	2	2	3	3	2	3	2	2	3	3	0	5	5	0	10
55	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	0	4	6	0	10
56	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	0	4	6	0	10
57	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	0	3	7	0	10
58	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	0	0	7	3	10
59	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	0	3	7	0	10
60	2	2	3	4	2	3	3	2	3	3	0	4	5	1	10
61	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	0	6	4	0	10
62	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	0	6	4	0	10
63	2	2	3	3	2	3	2	2	3	3	0	5	5	0	10
64	2	2	3	3	2	3	2	2	3	3	0	5	5	0	10
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
66	2	3	2	3	2	3	3	2	3	3	0	4	6	0	10
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
69	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	0	0	5	5	10
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	10	0	10
71	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	0	0	6	4	10
72	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	0	0	6	4	10

FORM ELP 4 : RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

No.	Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Status	Prioritas	Tidak Prioritas
1	2	3	4	5
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1				
2				
3				
4				
II	Komitmen terhadap Kompetensi			
III	Kepemimpinan yang Kondusif			
IV	Struktur Organisasi			
V	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab			
VI	Kebijakan Pengembangan SDM			
VII	Pengawasan Internal			
VIII	Hubungan Kerja yang Baik			

Fasilitator dan pimpinan Instansi Pemerintah harus secara bersama-sama membahas rencana tindak perbaikan apa yang akan dilaksanakan.

Rencana tindak perbaikan ini idealnya harus didokumentasikan dalam rencana tindak perbaikan yang telah disepakati (agreed action plans).

Kolom 1 Sudah jelas

Kolom 2 Diisi dengan sub unsur lingkungan pengendalian dan rencana tindakan perbaikan lingkungan yang direncanakan atas sub unsur tersebut

Kolom 3 Diisi dengan simpulan atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian (Memadai, Cukup Memadai, Kurang Memadai, Tidak Memadai)

Kolom 4 Diisi dengan *tick mark* (v) atas masing-masing rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian jika dianggap prioritas oleh Pimpinan Instansi Pemerintah terkait

Kolom 5 Diisi dengan *tick mark* (v) atas masing-masing rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian jika tidak dianggap prioritas oleh Pimpinan Instansi Pemerintah terkait

Form ELP 5: Penggabungan Hasil CEE dengan CSA Penilaian Risiko

No.	Kegiatan/ Instansi	Tujuan	Risiko	Keg. Pengendalian Sebelum Hasil CEE	Keterkaitan dengan Kelemahan Lingkungan Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan
1	2	3	4	5	6	7

Perlu dilakukan pengkaitan hasil CEE dengan proses CSA unsur-unsur SPIP lainnya, karena CEE merupakan bagian dari keseluruhan proses CSA dalam rangka implementasi SPIP.

PETUNJUK PENGISIAN

- Kolom 1 Sudah jelas.
- Kolom 2 Diisi dengan nama kegiatan jika penilaian risiko dilakukan di tingkat kegiatan, diisi dengan nama Instansi jika penilaian risiko dilakukan di tingkat instansi.
- Kolom 3 Diisi dengan tujuan kegiatan atau tujuan instansi.
- Kolom 4 Diisi dengan uraian risiko yang dihasilkan dari proses CSA penilaian risiko.
- Kolom 5 Diisi dengan kegiatan pengendalian yang dirancang untuk menangani masing-masing risiko. Rancangan kegiatan pengendalian ini belum memperhatikan hasil CEE. Jika CEE telah dilaksanakan sebelum proses CSA Penilaian Risiko maka kolom ini tidak perlu diisi, dan langsung ke kolom 7.
- Kolom 6 Diisi dengan sub unsur lingkungan pengendalian yang terkait dengan masing-masing risiko. Hanya sub unsur yang berdasarkan hasil CEE lemah saja yang dikaitkan. Jika CEE telah dilaksanakan sebelum proses CSA Penilaian Risiko maka kolom ini tidak perlu diisi, dan langsung ke kolom 7. Hal ini karena pada saat identifikasi risiko, kelemahan lingkungan pengendalian telah dipertimbangkan.
- Kolom 7 Diisi dengan rancangan kegiatan pengendalian untuk menangani risiko. Rancangan kegiatan pengendalian ini telah mempertimbangkan kelemahan lingkungan pengendalian hasil CEE

FORM ELP 3 : SIMPULAN SEMENTARA HASIL CEE

Sub Unsur	Hasil ELP 2	Penjelasan	Hasil ELP 1	Penjelasan	Analisis	Kesimpulan Sementara	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7	8
Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Tidak Memadai	1. Lemahnya pengembangan sikap etika dan tata nilai seperti:					
		1) Kode etik belum disusun dan belum secara rutin dimutakhirkan					
		2) Pendapatan belum mencerminkan kinerja pegawai					
		2. Kurangnya komunikasi komitmen akan nilai etika seperti: Belum adanya penyampaian informasi/dokumen pernyataan kode etik/aturan perilaku kepada seluruh pegawai					
		3. Kurangnya penekanan kembali atas pentingnya integritas dan nilai etika seperti: Belum adanya media (majalah, buletin dan lain-lain) yang menginformasikan pelaksanaan kode etik					
		4. Kurangnya pengawasan terhadap prinsip-prinsip integritas dan nilai etika, seperti:					
		1) Kode etik/aturan perilaku belum seluruhnya ditandatangani					
		2) Kode etik/aturan perilaku belum seluruhnya dibaca/dipahami					

		3) Sosialisasi kode etik/aturan perilaku belum seluruhnya diikuti pegawai					
		4. Kurangnya penanganan terhadap perbedaan nilai-nilai integritas dan etika, seperti:					
		1) Pelanggaran terhadap kode etik belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh petugas yang kompeten dan independen					
Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai						
Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai						
Struktur Organisasi	Cukup Memadai						
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Cukup Memadai						
Kebijakan Pengembangan SDM	Cukup Memadai						
Pengawasan Internal	Cukup Memadai						
Hubungan Kerja yang Baik	Cukup Memadai						

Hasil identifikasi permasalahan lingkungan pengendalian ≠ Hasil survei persepsi ❏ gali lebih dalam saat pembahasan dengan Pimpinan Instansi

PETUNJUK PENGISIAN

- Kolom 1 Diisi delapan sub unsur lingkungan pengendalian
- Kolom 2 Diisi dengan simpulan dari formulir ELP2 atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian (Memadai, Cukup Memadai, Kurang Memadai, Tidak Memadai)
- Kolom 3 Diisi dengan uraian simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian berdasarkan formulir ELP2
- Kolom 4 Diisi dengan simpulan dari formulir ELP1 atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian (Memadai, Cukup Memadai, Kurang Memadai, Tidak Memadai)
- Kolom 5 Diisi dengan uraian simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian berdasarkan formulir ELP2
- Kolom 6 Diisi dengan analisis fasilitator atas kondisi masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian berdasarkan hasil ELP1 dan ELP2. Jika hasil keduanya sama, maka fasilitator akan menyimpulkan sesuai dengan hasil tersebut. Jika hasilnya bertentangan maka diperlukan pertimbangan profesional fasilitator untuk mengambil simpulan sementara untuk nantinya dibahas lebih lanjut dengan pimpinan instansi guna memperoleh pertimbangan dan data lebih lanjut sehingga dapat dihasilkan simpulan akhir.
- Kolom 7 Diisi dengan simpulan fasilitator atas kondisi masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian (Memadai, Cukup Memadai, Kurang Memadai, Tidak Memadai)
- Kolom 8 Diisi dengan uraian simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian sesuai dengan kolom 7

Form ELP 2: Rekapitulasi Hasil Kuesioner CEE

NO.	SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		ATRIBUT/ELEMEN DARI SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		PERTANYAAN	KESIMPULAN PER PERTANYAAN	JAWABAN KUESIONER					
									1	2	3	4	Σ	
1	2	3		4	5		6	7	8					
1	A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	Kurang Memadai	2	PENGEMBANGAN — Pimpinan Instansi mengembangkan sikap etika dan tata nilai yang dapat dimengerti oleh seluruh pegawai	Cukup Memadai	3	Apakah Para pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi? (Misalnya keteladanan, pesan moral dan lain-lain)	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
2							Apakah Kode etik telah disusun?	Memadai	4	0	0	0	10	10
3							Apakah Kode etik secara rutin dimutakhirkan?	Kurang Memadai	2	0	10	0	0	10
4							Apakah Pendapatan pegawai disesuaikan dengan kinerjanya?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
5							Apakah Sistem Penggajian/Remunerasi pejabat yang telah ada sekarang mendorong peningkatan integritas & nilai?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
6				KOMUNIKASI — Pimpinan Instansi mengkomunikasikan komitmennya akan nilai-nilai etika melalui perkataan dan tindakan	Kurang Memadai	2	Apakah dokumen Pernyataan Kode etik telah disampaikan kepada seluruh pegawai?	Kurang Memadai	2	0	10	0	0	10
7							Apakah di dalam sosialisasi kode etik dijelaskan tentang bagaimana prakteknya dalam situasi sehari-hari?	Cukup Memadai	3	0	3	7	0	10
8							Apakah Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun telah diinformasikan kepada pihak ketiga?	Kurang Memadai	2	0	7	3	0	10
9				PENEKANAN KEMBALI —pentingnya integritas dan nilai-nilai etika dikomunikasikan dan ditekankan berulang kali kepada semua pegawai secara tepat pada organisasi	Kurang Memadai	2	Apakah Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain-lain) menginformasikan pelaksanaan kode etik?	Kurang Memadai	2	0	6	3	1	10
10				PENGAWASAN — terdapat proses-proses untuk melakukan pengawasan terhadap prinsip-prinsip integritas dan nilai-nilai etika	Cukup Memadai	3	Apakah seluruh pegawai secara rutin telah menandatangani pernyataan kode etik/aturan perilaku?	Cukup Memadai	3	0	4	6	0	10
11							Apakah Pernyataan Kode etik telah dibaca oleh semua pegawai?	Memadai	4	0	4	0	6	10
12							Apakah Pernyataan Kode etik telah dipahami oleh semua pegawai?	Memadai	4	0	4	0	6	10
13							Apakah sosialisasi kode etik dan aturan perilaku organisasi diikuti oleh semua pegawai?	Cukup Memadai	3	0	4	6	0	10
14							Apakah Terdapat fungsi khusus yang melayani pengaduan masyarakat?	Cukup Memadai	3	0	3	7	0	10
15				DEVIASI/PERBEDAAN ditanggapi — deviasi/perbedaan dari nilai-nilai integritas dan nilai-nilai etika diidentifikasi tepat waktu sesuai tingkatan dalam organisasi	Kurang Memadai	2	Apakah pimpinan instansi mendapat informasi atas kepatuhan etika organisasi?	Memadai	4	0	2	3	5	10
16							Apakah Pelanggaran kode etik ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku?	Kurang Memadai	2	0	10	0	0	10
17							Apakah Tindak lanjut atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh petugas yang kompeten dan independen?	Kurang Memadai	2	0	10	0	0	10

NO.	SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		ATRIBUT/ELEMEN DARI SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		PERTANYAAN	KESIMPULAN PER PERTANYAAN		JAWABAN KUESIONER				
										1	2	3	4	Σ
1	2	3		4	5		6	7		8				
18	B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI;	Cukup Memadai	3	Identifikasi kompetensi — Kompetensi-kompetensi yang mendukung efektifitas pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko diidentifikasi	Memadai	4	Apakah Strategi dan perencanaan kompetensi pegawai dikomunikasikan secara memadai?	Memadai	4	0	2	2	6	10
19							Apakah SDM yang memadai tersedia untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi?	Memadai	4	0	4	0	6	10
20							Apakah pegawai yang kompeten secara tepat mengisi struktur organisasi?	Cukup Memadai	3	0	3	7	0	10
21				Pertahankan Individu – Organisasi mempekerjakan dan menggunakan individu yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan, pengendalian internal, <i>compliance</i> , dan manajemen risiko.	Cukup Memadai	3	Apakah Proses seleksi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi yang tepat untuk jabatan yang diisi?	Cukup Memadai	3	0	3	7	0	10
22							Apakah Anda setuju bahwa Pimpinan memiliki pemahaman yang luas tidak sekedar tupoksi saja?	Memadai	4	0	0	3	7	10
23							Apakah Kompetensi SDM dipantau secara efektif?	Memadai	4	0	4	0	6	10
24							Apakah Strategi perencanaan pelatihan meliputi pelatihan lintas bagian?	Cukup Memadai	3	0	4	6	0	10
25							Apakah Pelatihan yang memadai selalu dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting ?	Kurang Memadai	2	0	10	0	0	10
26							Apakah Anda Setuju bahwa Prosedur akuntansi dilaksanakan dengan baik oleh staf keuangan?	Cukup Memadai	3	0	0	5	5	10
27				Evaluasi Kompetensi — Kompetensi yang dibutuhkan dievaluasi secara regular dan dijaga kesinambungannya	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa Prosedur untuk menilai kompetensi pegawai telah didokumentasikan secara memadai?	Cukup Memadai	3	0	4	6	0	10
28							Apakah Anda Setuju bahwa assessment/penilaian kompetensi dari individu kunci telah didokumentasikan secara lengkap?	Cukup Memadai	3	0	3	7	0	10
29							Apakah terjadi kelemahan operasi yang disebabkan oleh rendahnya kompetensi	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
30	C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF;	Cukup Memadai	3	Menetapkan "Tone" Institusi / SET THE TONE — Filosofi dan style Pimpinan Instansi menekankan pelaporan internal dan eksternal yang berkualitas tinggi dan transparan, juga pentingnya pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa Keahlian yang diperlukan sesuai uraian tugas telah diperhitungkan dalam penilaian kinerja setiap pegawai?	Cukup Memadai	3	0	2	8	0	10
31							Apakah Anda Setuju bahwa Pegawai dapat diandalkan untuk mencapai tujuan pengendalian intern?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
32							Apakah Anda Setuju bahwa Gaya dan "tone" kepemimpinan yang kondusif dirasakan baik di dalam maupun di luar organisasi?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
33							Apakah Risiko, pengendalian dan ketaatan didiskusikan secara memadai dalam rapat?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
34							Apakah Anda Setuju bahwa kepemimpinan organisasi sangat memadai?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10

NO.	SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		ATRIBUT/ELEMEN DARI SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		PERTANYAAN	KESIMPULAN PER PERTANYAAN	JAWABAN KUESIONER					
									1	2	3	4	Σ	
1	2	3		4	5		6	7	8					
35				Artikulasi Tujuan — Pimpinan Instansi menetapkan dan mengartikulasikan secara jelas tujuan pengendalian internal	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa setiap pegawai memahami tujuan pengendalian intern?	Cukup Memadai	3	0	4	6	0	10
36				Memilih Prinsip-prinsip dan Estimasi-Estimasi — Pimpinan Instansi mengikuti disiplin proses tujuan dalam mengembangkan tujuan pengendalian internal	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa setiap pegawai turut serta dalam menetapkan tujuan pengendalian intern?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
37	D. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	Cukup Memadai	3	Tetapkan Tanggungjawab – Pimpinan Instansi menetapkan tanggungjawab pelaporan internal untuk setiap area fungsional dan unit organisasi	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa Desain struktur organisasi sudah sesuai dengan ukuran dan karakternya?	Cukup Memadai	3	0	2	8	0	10
38							Apakah Anda Setuju bahwa pejabat yang ditunjuk mengerti dan taat pada tanggung jawab pelaporan yang ada?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
39							Apakah Risiko yang muncul dari keberadaan struktur organisasi diperhitungkan pimpinan instansi?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
40							Apakah Anda Setuju bahwa Struktur organisasi yang ada mempermudah melihat risiko?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
41				Menjaga Struktur — Pimpinan Instansi menjaga struktur organisasi yang memfasilitasi pelaporan yang efektif dan komunikasi lainnya tentang pengendalian internal diantara fungsi dan posisi Pimpinan Instansi	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa pejabat yang ditunjuk dalam struktur pengendalian internal mengerti peran dan tanggungjawab mereka?	Cukup Memadai	3	0	4	6	0	10
42							Apakah Anda Setuju bahwa pejabat yang ditunjuk dalam struktur pengendalian internal mengerti uraian pekerjaannya?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
43				Menjaga Kelangsungan Proses — Garis Pelaporan Pimpinan Instansi mengetahui pentingnya menjaga kelangsungan proses sebagai tujuan verifikasi dari informasi yang dihasilkan dari sistem informasi organisasi	Cukup Memadai	3	Apakah Proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi dilakukan secara berkala?	Cukup Memadai	3	0	4	6	0	10
44	E. PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT;	Cukup Memadai	3	Pimpinan Instansi mengawasi pengendalian internal dan bagian risiko – Pimpinan Instansi mengawasi proses penentuan tanggung jawab untuk pengendalian internal dan Pimpinan Instansi risiko	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa peran pengawasan telah dilaksanakan secara tepat oleh pimpinan?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
45							Apakah diskusi pengawasan yang tepat selalu dilakukan pada saat rapat pimpinan?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
46				Tentukan Tanggungjawab – penunjukan tanggungjawab dan delegasi otoritas didefinisikan secara jelas untuk semua pegawai yang ikut serta dalam pengendalian internal dan Pimpinan Instansi risiko, proses pelaporan keuangan, dan compliance.	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa penndelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
47							Apakah Anda Setuju bahwa Kriteria penndelegasian wewenang telah tepat?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
48							Apakah Anda Setuju bahwa Pimpinan mengerti tanggung jawab dan kewenangannya?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
49							Apakah Kewenangan direviu secara periodik?	Cukup Memadai	3	0	4	6	0	10
50							Apakah Kewenangan dan tanggung jawab dimengerti secara jelas?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
51				Batasan Otoritas – Penunjukan otoritas dan tanggung jawab termasuk batasan yang tepat.	Cukup Memadai	3	Apakah Pembatasan kewenangan diverifikasi dan diuji?	Kurang Memadai	2	0	10	0	0	10
52							Apakah Proses dan tingkatan otorisasi dilaksanakan sesuai ketentuan?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10

NO.	SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		ATRIBUT/ELEMEN DARI SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		PERTANYAAN	KESIMPULAN PER PERTANYAAN	JAWABAN KUESIONER					
									1	2	3	4	Σ	
1	2	3		4	5		6	7	8					
53	F. PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA;	Cukup Memadai	3	Penetapan Kebijakan SDM - Pimpinan Instansi menetapkan kebijakan SDM dan prosedur-prosedur yang mendemonstrasikan komitmen pada integritas, etika, dan kompetensi.	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa Prosedur dan Kebijakan SDM lengkap, mutakhir, dan disetujui dengan tepat?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
54							Apakah Anda Setuju bahwa Kebijakan SDM secara efektif dipahami oleh para pegawai?	Cukup Memadai	3	0	5	5	0	10
55				Penerimaan dan Retensi – Penerimaan dan retensi pegawai pada posisi kunci didasarkan pada prinsip-prinsip integritas dan kompetensi yang diperlukan sehubungan dengan posisi tersebut	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa Prosedur rekrutmen dan retensi, maupun Prosedur penyaringan SDM telah tersedia?	Cukup Memadai	3	0	4	6	0	10
56							Apakah Anda Setuju bahwa Setiap SDM yang direkrut memenuhi kebutuhan posisi yang ada?	Cukup Memadai	3	0	4	6	0	10
57							Apakah Anda Setuju bahwa Proses pergantian jabatan untuk posisi kunci memadai?	Cukup Memadai	3	0	3	7	0	10
58							Apakah Anda Setuju bahwa tingkat pengunduran diri pegawai rendah?	Cukup Memadai	3	0	0	7	3	10
59				Pelatihan yang cukup – Pimpinan Instansi membantu pegawai dengan menyediakan akses pada kebutuhan alat maupun pelatihan yang dibutuhkan untuk melaksanakan peran mereka	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa program pengembangan SDM yang ada dapat meningkatkan pengendalian intern?	Cukup Memadai	3	0	3	7	0	10
60							Apakah Anda Setuju bahwa Program perencanaan pelatihan memadai?	Cukup Memadai	3	0	4	5	1	10
61							Apakah Anda Setuju bahwa Anggaran yang tersedia untuk pengembangan SDM memadai?	Kurang Memadai	2	0	6	4	0	10
62							Apakah Tersedia program pendidikan tambahan di organisasi?	Kurang Memadai	2	0	6	4	0	10
63				Kinerja dan Kompensasi – Evaluasi kinerja pegawai dan praktek-praktek kompensasi organisasi termasuk Pimpinan Instansi, mendukung pencapaian tujuan pengendalian internal	Cukup Memadai	3	Apakah Evaluasi kinerja manajemen tersedia?	Cukup Memadai	3	0	5	5	0	10
64							Apakah Anda Setuju bahwa Proses evaluasi kinerja manajemen dilakukan sesuai ketentuan berlaku?	Cukup Memadai	3	0	5	5	0	10
65							Apakah Anda Setuju bahwa pendapatan/honor pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
66	G. PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF	Cukup Memadai	3	Kepercayaan-memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	Cukup Memadai	3	Apakah Internal Auditor melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas secara periodik?	Cukup Memadai	3	0	4	6	0	10
67				Alarm RISIKO - memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Pimpinan Instansi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa Internal Auditor memiliki pengetahuan akan area pengendalian risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
68				KUALITAS - memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	Cukup Memadai	3	Apakah Internal Auditor melakukan pengujian keuangan secara periodik?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10
69							Apakah Internal Auditor melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal secara periodik?	Cukup Memadai	3	0	0	5	5	10
70							Apakah Internal Auditor melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya?	Cukup Memadai	3	0	0	10	0	10

NO.	SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		ATRIBUT/ELEMEN DARI SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		PERTANYAAN	KESIMPULAN PER PERTANYAAN	JAWABAN KUESIONER					
									1	2	3	4	Σ	
1	2	3		4	5		6	7	8					
71	H. HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	Cukup Memadai	3	Terdapat mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.	Cukup Memadai	3	Apakah pimpinan instansi membina hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional?	Cukup Memadai	3	0	0	6	4	10
72							Apakah pimpinan instansi membina hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan (inspektorat, BPKP, dan BPK)?	Cukup Memadai	3	0	0	6	4	10

KETERANGAN WARNA :

	Tidak Memadai
	Kurang Memadai
	Cukup Memadai
	Memadai

FORM ELP 1 : HASIL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

NO	HASIL AUDIT/WAWANCARA/REVIU LAINNYA	REF	KETERKAITAN DENGAN UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN							
			SU 1	SU 2	SU 3	SU 4	SU 5	SU 6	SU 7	SU 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Belum ada kode etik/aturan perilaku yang diinternalisasikan dengan baik		X							
2	Pelatihan belum berdasar kompetensi			X						
3	Sudah memiliki SOP			V						
4	Sistem informasi baik					V				
5	Pendelegasian wewenang tidak jelas						X			
6	Proses manajemen mutu (ISO)			V						
7	Kelemahan pencatatan penggunaan bahan sampel						X			X
8	Cakupan wilayah sampling luas			X		X				
9	Belum ada mekanisme tindak lanjut temuan								X	X

KESIMPULAN

1 Kelemahan sub unsur 1 (penegakan integritas dan nilai etika) berupa belum adanya kode etik atau aturan perilaku yang diinternalisasikan dengan baik, diantaranya:

- Aturan perilaku
- Sosialisasi aturan perilaku
- Pembacaan dan penandatanganan aturan perilaku
- Pemahaman kode etik
- Tindakan lanjut pelanggaran kode etik

2 Kelemahan sub unsur 2 (komitmen terhadap kompetensi) berupa belum adanya kode etik atau aturan perilaku yang diinternalisasikan dengan baik, diantaranya:

Identifikasi Tujuan Strategis

Visi : Terwujudnya Etos Kerja serta Terwujudnya Pelayanan Prima dalam melayani Masyarakat

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran
1	2	3	4	5
1	Tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi terpadu	Meningkatkan pelayanan yang prima	meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur disegala bidang	Sistem pelayanan yang baik
2	Peningkatkan Nilai LAKIP Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Peningkatkan Nilai LAKIP Kecamatan	Tercapainya Nilai LAKIP Kecamatan sesuai dengan target Pemerintahan Daerah	Pencapaian seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Kelengkapan data pendukung terhadap laporan yang dihasilkan
3	Tertibnya administrasi pemerintahan nagari dan pengelolaan keuangan nagari yang baik.	Sistem Pemerintahan Nagari yang sesuai dengan perundang-undangan	Pemerintahan Nagari yang baik	Pembinaan terhadap tata kelola administrasi dan keuangan pemerintahan Nagari

Catatan:

Uraian Visi berisi visi unit organisasi di baris atas kolom

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan dokumen renstra
4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang selaras dokumen renstra
5. Kolom 5 berisi uraian tentang kegiatan yang mendukung capaian tujuan strategis

Identifikasi Kegiatan & Tujuan Kegiatan

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Keselarasn dengan tujuan/sasaran strategis	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pelayanan administrasi terpadu	Agar masyarakat dapat terpuaskan dalam memperoleh pelayanan PATEN	selaras	
2	Penunjang Operasional dan perencanaan dan pelaporan	Meningkatkan Nilai LAKIP Kecamatan	selaras	
3	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan nagari	Meningkatkan kapasitas dan kopetensi aparatur nagari terutama dalam pengelolaan keuangan nagari	selaras	

Catatan:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan atas kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
4. Kolom 4 berisi uraian tentang keselarasan tujuan kegiatan dengan tujuan/sasaran diatasnya (strategis)

SKPD :

IDENTIFIKASI RISIKO

No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan administrasi terpadu	Semakin meningkatnya jumlah aparatur yang memiliki kopetensi yang baik	Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi terpadu	Kasi Pelayanan	Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pendidikan dan pelatihan aparatur tentang PATEN	semua masyarakat merasa puas terhadap pelayan yang diberikan
2	Penunjang Operasional dan perencanaan dan pelaporan	Semakin meningkatkan Nilai LAKIP Kecamatan	Kurangnya kelengkapan dari laporan maka akan menurunkan Nilai LAKIP Kecamatan	Kasubag Perencanaan Pelaporan dan Keuangan	Terbatasnya pengetahuan SDM berkaitan dengan pelaporan keuangan pemerintah	Memiliki laporan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik
3	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan nagari	Semakin meningkatkan kapasitas dan kopetensi aparatur nagari terutama dalam pengelolaan keuangan nagari	Adanya aparatur nagari yang belum memiliki kopetensi yang baik sehingga akan mempengaruhi kinerja dan laporan keuangan	Kasi. Pemerintahan	Terbatasnya pengetahuan SDM nagari berkaitan dengan pelaporan keuangan pemerintah	Memiliki laporan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik

- Ket:
- 1 Kolom 1 berisi no urut
 - 2 Kolom 2 berisi uraian tujuan yang diidentifikasi
 - 3 Kolom 3 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
 - 4 Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
 - 5 Kolom 5 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko (fasilitator agar mengarahkan peserta diskusi untuk mengaitkan risiko dengan lingkungan pengendalian)
 - 6 Kolom 6 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

ANALISIS RISIKO

SKPD:

No	Tujuan yang didentifikasi		Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko		Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Total Skor (7x8)
1	2		3	4		5	6	7	8	9
3	Tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi terpadu	1	Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi terpadu	Kasi. Pelayanan	1	Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pendidikan dan pelatihan aparatur tentang PATEN	Masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi terpadu dengan baik	2.00	2.00	4.00
2	Meningkatkan Nilai LAKIP Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	2	Tidak tercapainya target nilai LAKIP Kecamatan	Kasubag Perencanaan Pelaporan dan Keuangan	1	Terbatasnya pengetahuan SDM berkaitan dengan pelaporan keuangan pemerintah	Memiliki laporan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik	2.00	2.00	4.00
2	Semakin meningkatkan kapasitas dan kopetensi aparatur nagari terutama dalam pengelolaan keuangan nagari	3	Adanya aparatur nagari yang belum memiliki kopetensi yang baik sehingga akan mempengaruhi kinerja dan laporan keuangan	Kasi. Pemrintahan	1	Terbatasnya pengetahuan SDM nagari berkaitan dengan pelaporan keuangan pemerintah	Memiliki laporan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik	2.00	2.00	4.00

- Ket:
- 1

Kolom 1 berisi no urut
- 2

Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
- 3

Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
- 4

Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
- 5

Kolom 5 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
- 6

Kolom 6 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
- 7

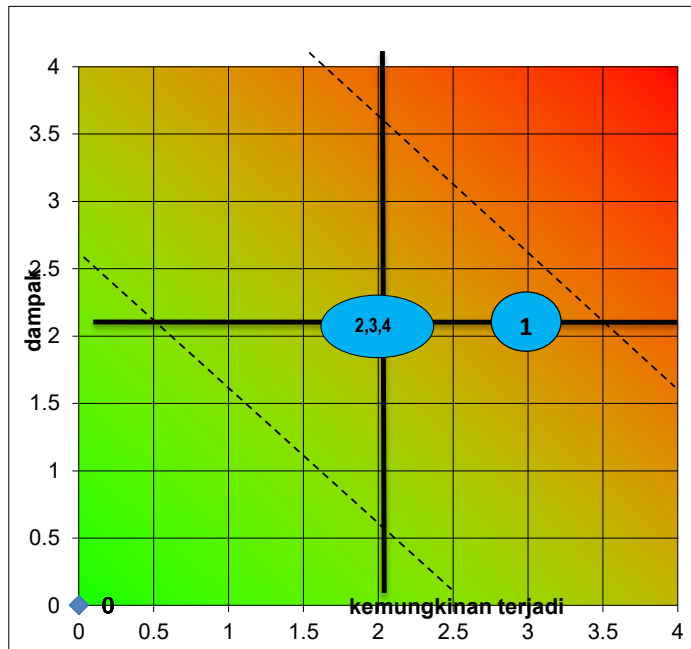
Kolom 7 berisi nilai Dampak terjadinya risiko tersebut.
- 8

Kolom 8 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

Kertas Kerja Pengisian Skala Dampak dan Kemungkinan

[illegible]

PETA RISIKO



Keterangan:

Tingkat I : Level risiko sangat rendah

Tingkat II : Level risiko rendah

Tingkat III : Level risiko tinggi

Tingkat IV : Level risiko sangat tinggi

RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

SKPD :

N o	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi terpadu	Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi terpadu	adanya kotak saran dari masyarakat atas pelayanan administrasi terpadu kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	adanya penilaian kinerja PATEN Kecamatan Basa ampek Balai oleh OPD terkait Kab. Pesisir Selatan	cukup efektif	adanya evaluasi dari pemkab atas pelayanan masyarakat yang ada di kecamatan BAB Tapan	Kasi. Pelayanan	oktober 2020
2	Semakin meningkatkan Nilai LAKIP Kecamatan	Kurangnya kelengkapan dari laporan maka akan menurunkan Nilai LAKIP Kecamatan	Meningkatkan sistematika penyusunan laporan dan data pendukung dari program kegiatan yang dilaksanakan	koordinasi dan pembinaan dari pihak inspektorat kabupaten Pesisir Selatan	cukup efektif	kerjasama yang baik dengan kasi, kasubag terhadap laporan yang dihasilkan	kasubag Perencanaan Pelaporan dan Keuangan	Mar-20
3	Semakin meningkatkan kapasitas dan kopetensi aparatur nagari terutama dalam pengelolaan keuangan nagari	Adanya aparatur nagari yang belum memiliki kopetensi yang baik sehingga akan mempengaruhi kinerja dan laporan keuangan	dilakukan pembinaan dari eksternal kecamatan seperti inspektorat kabupaten atas pengelolaan keuangan nagari	selalu dilakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap laporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari	cukup efektif	pembinaan dan pemeriksaan langsung oleh inspektorat kabupaten ke pemerintahan nagari	Kasi. Pemerintahan	oktober 2020

Ket

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut

1

Kolom 2 Diisi uraian risiko yang diidentifikasi

2

Kolom 3 Diisi dengan Pengendalian yang harus ada atas Risiko

3

Kolom 4 Diisi Pengendalian yang sudah ada

4

Kolom 5 Diisi Efektivitas Pengendalian yang ada

5

Kolom 6 Diisi Pengendalian yang masih dibutuhkan

6

Kolom 7 Diisi dengan nama Penanggungjawab untuk pengendalian

7

Kolom 8 Diisi dengan rencana waktu pelaksanaan perbaikan pengendalian

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SKPD :

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Direncanakan	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi terpadu	adanya evaluasi dari pemkab atas pelayanan masyarakat yang ada di kecamatan BAB Tapan	adanya akun facebook/web kecamatan atas informasi-informasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan BAB Tapan	Kasi. Pelayanan	Masyarakat Kecamatan BAB Tapan	oktober 2020
2	Semakin meningkatkan Nilai LAKIP Kecamatan	pembinaan dan pemeriksaan langsung oleh inspektorat kabupaten ke pemerintahan Kecamatan	undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah pusat/daerah tentang pengelolaan desa/nagari yang selalu diperbaharui	kasubag Perencanaan Pelaporan dan Keuangan	aparatur kecamatan BAB Tapan	oktober 2020
3	Semakin meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur nagari terutama dalam pengelolaan keuangan nagari	pembinaan dan pemeriksaan langsung oleh inspektorat kabupaten ke pemerintahan nagari	undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah pusat/daerah tentang pengelolaan desa/nagari yang selalu diperbaharui	Kasi. Pemerintahan	aparatur nagari se-Kecamatan BAB Tapan	oktober 2020

Keterangan:

- 1 Kolom 3 : Diisi dengan Informasi Pengendalian yang ingin disampaikan
- 2 Kolom 4 : Diisi dengan Bentuk dan Sarana komunikasi yang akan digunakan untuk penyampaian informasi seperti **Laporan, Surat, Rapat, lainnya**
- 3 Kolom 5: Diisi dengan Kepala Satuan Kerja, Kabag/Kabid, Kelompok Pegawai (nama unit kerja), baik internal maupun eksternal
- 4 Kolom 6 : Diisi dengan saat tertentu, periodik mingguan/bulanan/tahunan

DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN

SKPD

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Uraian Pengendalian	Metode Pemantauan yang ada	Pemantauan yang akan digunakan			Tindakan Korektif Yang Diperlukan
				Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi terpadu	adanya evaluasi dari ombusman/pemkab atas pelayanan masyarakat yang ada di kecamatan BAB Tapan	sudah ada	kuisisioner	Bagian Organisasi	oktober 2020	'-
2	Semakin meningkatkan Nilai LAKIP Kecamatan	pembinaan dan pemeriksaan langsung oleh inspektorat kabupaten ke pemerintahan Kecamatan	sudah ada	berkelanjutan	Inspektorat	Maret 2020	'-
3	Semakin meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur nagari terutama dalam pengelolaan keuangan nagari	pembinaan dan pemeriksaan langsung oleh inspektorat kabupaten ke pemerintahan nagari	sudah ada	berkelanjutan	atasan langsung	oktober 2020	'-

Legenda :

1. Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 Diisi sesuai Pengendalian yang mengalami penyempurnaan
3. Kolom 3 Cukup jelas
4. Kolom 4 Diisi dengan Atasan/Tim Khusus/APIP
5. Kolom 5 Diisi dengan Pihak/Pejabat yang bertanggungjawab melakukan pemantauan
6. Kolom 6 Cukup jelas
7. Kolom 7 Tindakan yang diperlukan apabila diperlukan penyempurnaan lebih lanjut

DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI

OPD: KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

No	Tujuan yang didentifikasi		Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko		Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2		3	4		5	6
1	Tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi terpadu	1	Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi terpadu	Kasi Pemerintahan	1	Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pendidikan dan pelatihan aparatur tentang PATEN	Masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi terpadu dengan baik
2	Meningkatkan Nilai LAKIP Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	1	Kurangnya kelengkapan dari laporan maka akan menurunkan Nilai LAKIP Kecamatan	Kasubag Perencanaan Pelaporan dan Keuangan	1	Terbatasnya pengetahuan SDM berkaitan dengan pelaporan keuangan pemerintah	Memiliki laporan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik
3	Tertibnya administrasi pemerintahan nagari dan pengelolaan keuangan nagari yang baik.	2	adanya keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh Perangkat pemerintahan Nagari	Kasi Pemerintahan	1	keterbatasannya pengetahuan perangkat Nagari terhadap penataan administrasi pemerintahan nagari dan pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari	Sistem pemerintahan Nagari yang baik

LAMPIRAN III

RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

OPD : KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan/ rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian		Penanggung jawab pelaksanaan perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi terpadu	Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi terpadu	adanya kotak saran dari masyarakat atas pelayanan administrasi terpadu kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	adanya penilaian kinerja PATEN Kecamatan Basa ampek Balai oleh OPD terkait Kab. Pesisir Selatan	Kasi Pelayanan	Oktober 2020
2	Meningkatnya Nilai LAKIP Kecamatan	Tidak tercapainya target nilai LAKIP Kecamatan	adanya Evaluasi dari Pimpinan terhadap kinerja masing-masing aparatur pemerintahn	adanya saran dan pembinaan terhadap laporan yang disajikan dan data pendukung setiap kegiatan	Kasubag Perencanaan, keuangan dan Pelaporan	Oktober Maret 2020
3	Semakin meningkatkan kapasitas dan kopetensi aparatur nagari terutama dalam administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan nagari	adanya keterbatasan wewenang/kebijakan pemerintahan kecamatan terhadap pemerintahan Nagari	fasilitasi dan pembinaan pemerintahan kecamatan kepada pemerintahan Nagari	adanya pembinaan dan pemeriksaan dari inspektorat kabupaten Pesisir Selatan ke Pemerintahan Nagari	Kasi. Pemerintahan	oktober 2020

Ket:

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 Diisi uraian risiko yang diidentifikasi

Kolom 3 Diisi dengan Pengendalian yang harus ada atas Risiko

Kolom 4 Diisi Pengendalian yang sudah ada

Kolom 5 Diisi Efektivitas Pengendalian yang ada

Kolom 6 Diisi Pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom 7 Diisi dengan nama Penanguungjawab untuk pengendalian

Kolom 8 Diisi dengan rencana waktu pelaksanaan perbaikan pengendalian

"\"

LAMPIRAN IV

RENCANA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGENDALIAN

OPD : KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Direncanakan	Media/Bentuk/Sarana/Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi terpadu	adanya evaluasi dari Pemkab atas pelayanan masyarakat yang ada di kecamatan BAB Tapan	Adanya akun facebook/web kecamatan atas informasi-informasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan BAB Tapan	Kasi Pelayanan	Masyarakat Kecamatan BAB Tapan	oktober 2020
2	Meningkatnya Nilai LAKIP Kecamatan	Pembinaan dan hasil Penilaian dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Pencapaian Kinerja pada program dan kegiatan yang dilaksanakan dan kelengkapan Data pendukung.	kasubag Perencanaan Pelaporan dan Keuangan	aparatur kecamatan BAB Tapan	Maret 2020
3	Semakin meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur nagari terutama dalam administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan nagari	pembinaan dan pemeriksaan langsung oleh inspektorat kabupaten ke pemerintahan nagari	undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah pusat/daerah tentang pengelolaan desa/nagari yang selalu diperbaharui	Kasi Pemerintahan	Aparatur Nagari se Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	oktober 2020

RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN

OPD : KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian yang direncanakan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang diperlukan	Penanggung jawab Pelaksanaan Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5	6
1	Tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi terpadu	adanya evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten atas pelayanan masyarakat yang ada di kecamatan BAB Tapan	berkelanjutan	atasan langsung	oktober 2020
2	Peningkatan Nilai LAKIP Kecamatan	pembinaan dan penilaian langsung oleh inspektorat kabupaten ke Pemerintahan Kecamatan	berkelanjutan	atasan langsung	Maret 2020
3	Tertatanya sistem pengelolaan pemerintahan administrasi Nagari dan pengelolaan keuangan pemerintahan Nagari	pembinaan dan penilaian langsung oleh Inspektorat Kabupaten ke Pemerintahan Nagari	berkelanjutan	atasan langsung	oktober 2020